

Pengaruh Faktor Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengembangan Jasa Layanan Non Finansial Program *Business Development Service* (BDS) terhadap Kinerja Pengelola Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe

Mariyudi

Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

Ikramuddin

Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

Abstract: *The aim of this research is to analyze the relationship of Business Development Service (BDS) and manager performance of SME in Aceh Utara and Lhokseumawe. The scope of the study is limited to the BDS program that including the relationship of planning, implementation and development to the management performance of SME. The multiple regressions was used to analyze the data. The result indicates that the BDS program has positive relationship to the manager performance of BDS in Aceh Utara and Lhokseumawe.*

Keywords: *BDS, performance of SME, planning, implementation and development.*

Sebelum gempa bumi dan tsunami melanda Propinsi NAD dan Nias pada tanggal 26 Desember 2004, hampir 70% masyarakat NAD-Nias yang tinggal di desa-desa pesisir, menggantungkan hidupnya pada pemanfaatan sumberdaya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun kekayaan sumberdaya alam yang ada tidak dapat mengangkat martabat dan kesejahteraan mereka. Lebih dari 1,25 juta jiwa masyarakat di desa-desa pesisir masih berada di bawah garis kemiskinan.

Setelah bencana gempa bumi dan tsunami, masyarakat di desa-desa pesisir yang sangat tergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan semakin menderita, seakan mereka berada di bawah titik nadir. Hancurnya infrastruktur ekonomi dan ratusan ribu korban jiwa manusia menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan hilangnya pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rusaknya sarana dan prasarana ekonomi seperti,

pasar, tempat usaha, sarana produksi, rumah/tempat tinggal serta lahan usaha mereka.

Terhentinya kegiatan perindustrian sebagai akibat kerusakan berat pada fasilitas kerja menyebabkan pengangguran meningkat. Kerusakan infrastruktur ekonomi seperti pasar, sarana produksi, dan transportasi merupakan salah satu faktor meningkatnya harga-harga barang di Aceh. Usaha kecil dan menengah yang terkena langsung tsunami berjumlah 5.176 unit.

Komitmen untuk membangun kembali Aceh datang dari pemerintah, masyarakat Indonesia dan masyarakat International. Perhatian seluruh penjuru dunia tidak hanya dukungan pada tahap darurat (emergency), melainkan juga dukungan pemulihan ekonomi dalam tahap rehabilitasi (rehabilitation) dan rekonstruksi (reconstruction). Tidak kurang dari US\$ 7,2 miliar dana masyarakat International telah dijanjikan untuk pemulihan NAD-Nias dan disalurkan melalui pemerintah, NGO Internasional dan nasional, dan badan internasional lainnya.

Masyarakat korban dan yang terkena dampak bencana, baik di desa-desa maupun di kota-kota, harus merintis dan memulai kegiatan ekonomi mereka dari titik nol. Berbagai langkah dan upaya telah dilakukan

Alamat Korespondensi:

Mariyudi, Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Jl. Tengku Chik Ditiro No. 26 Lancang Garam Lhokseumawe NAD

untuk menumbuhkan kembali kegiatan ekonomi ini. Di antara bidang utama pendukung kegiatan perekonomian adalah pertanian, perikanan, kehutanan industri, perdagangan, tenaga kerja dan pariwisata. Untuk mendukung pulihnya perekonomian serta meletakkan dasar-dasar ekonomi kedepan diperlukan penguatan kelembagaan ekonomi berbasis kerakyatan. Untuk mengembangkan kondisi tersebut maka pembentukan dan penguatan Lembaga Keuangan Mikro sebagai alternatif pembiayaan usaha kecil non bank mutlak diperlukan. Sistem bunga yang diperlakukan pada perbankan umum harus disesuaikan dengan kondisi religius setempat, yaitu sistem Syariah.

Pemerintah melalui BRR NAD-Nias bersamasama dengan pemerintah lokal, NGO, dan badan internasional lainnya saling bergandengan tangan untuk mewujudkan impian masyarakat agar tercapainya pemulihan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang.

Berbagai upaya ditempuh agar pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dan bangkit dari keterpurukan, salah satu solusi alternatif adalah penerapan konsep Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada usaha kecil menengah. Sektor Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) telah menunjukkan ketahanannya menghadapi gejolak makro serta mampu menunjukkan kinerja yang relatif lebih tangguh dalam menghadapi masa krisis yang panjang.

Menyadari berbagai kelemahan-kelemahan dalam karakter UKM serta mengingat potensi pengusaha kecil yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan di Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya dan Kabupaten Aceh Utara serta Kota Lhokseumawe pada khususnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) melakukan pembinaan terhadap UKMK diantaranya dengan program *Business Development Service* (BDS) yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja UKM. Pasca tsunami, program BDS juga semakin marak dilakukan oleh berbagai lembaga-lembaga seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta & perorangan, BRR, mitra (ILO, GTZ, MDTF, ADB, IOM, dan banyak LSM), lembaga penelitian di perguruan tinggi maupun asosiasi pengusaha kecil. Pusat koordinasi pelatihan juga diatur agar menjamin setting yang standar, pengendalian kualitas, kekonsistenan dalam kurikulum, dan sertifikasi kompetensi portabel.

Di Kabupaten Aceh Utara terdapat 300 UKMK dan di Kota Lhokseumawe terdapat tidak kurang dari 245 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang terbagi dalam 4 sektor atau jenis usaha di mana usaha industri non pertanian, usaha industri pertanian, usaha perdagangan dan usaha aneka jasa (Disperindagkop, 2007). Seluruh UKMK binaan tersebut yang berjumlah 545 UKMK dipastikan telah memperoleh layanan *Business Development Service* (BDS). Namun sejauh ini evaluasi dan monitoring terhadap keberhasilan program BDS dirasakan masih sangat kurang, baik terhadap kinerja usaha terlebih terhadap kinerja pengelola UKM.

Penilaian terhadap prestasi kerja pengelola UKM merupakan tuntutan yang prinsipil, hal ini mengingat begitu cepatnya perubahan lingkungan terjadi demikian juga persaingan menjadi semakin tajam. Diantara beberapa manfaat yang timbul dari penilaian prestasi kerja adalah dapat dilakukannya perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama ini, penyesuaian upah dan kompensasi, keputusan penempatan personil, kebutuhan terhadap pelatihan dan pengembangan, memperbaiki kesalahan analisis akibat ketidakakuratan informasi, serta tantangan-tantangan diluar dunia kerja.

Di dalam UU No. 9/1995 dan Bank Indonesia yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria:

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1 miliar;
- Milik WNI;
- Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung, maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar; dan
- Terbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Di mana Bank Indonesia cenderung untuk menggunakan kriteria ini, antara lain ketika menuliskan kriteria usaha kecil dalam Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Pemberian Kredit

Usaha Kecil (PBI No. 3/2/PBI/2001). Di situ disebutkan bahwa kriteria Usaha Kecil (UK) merujuk pada UU No. 9/1995.

Sementara itu, untuk mengakomodasi kalangan Usaha Menengah (UM), pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 10/1999. Menurut Inpres tersebut, UM adalah entitas usaha dengan aset bersih Rp200 juta-Rp10 miliar termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan instansi lain seperti Depperindag juga mengeluarkan ketentuan sendiri tentang industri skala kecil menengah (IKM) yang dituangkan dalam Keputusan Menpperindag (Kepmenperindag) No.257/MPP/Kep/7/1997. Di dalam Kepmenperindag tersebut disebutkan bahwa yang termasuk dengan IKM adalah usaha dengan nilai investasi maksimal Rp5 miliar termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan BPS juga membagi jenis IKM berdasarkan besarnya jumlah pekerja, yaitu: (a) kerajinan rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja di bawah 3 orang termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar, (b) usaha kecil, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5-9 orang, (c) usaha menengah, sebanyak 20-99 orang.

Ismawan (2002) menyebutkan definisi UKM ternyata tidak hanya rancu di Indonesia. Pada tingkat internasional pun ada banyak definisi yang digunakan untuk UKM. Demikian juga banyak negara yang tidak memiliki definisi yang sama. Berikut ini dilihat definisi UKM pada tingkat internasional.

Melihat berbagai macam definisi UKM dari berbagai negara dan lembaga internasional tersebut dapat disimpulkan bahwa kebanyakan negara dan lembaga internasional masih menganut ukuran kuantitatif dalam menentukan kriteria UKM. Berdasarkan kondisi perekonomian yang ada di masing-masing negara, definisinya pun berbeda jauh. Semakin maju perekonomian negara, batas kriterianya-misalnya hasil penjualan dan aset pun semakin tinggi. Namun, setidaknya berbagai definisi UKM di atas dapat kita jadikan referensi untuk menentukan definisi UKM yang sesuai bagi Indonesia.

Suhendar dan Eriyatno (2001) mendefinisikan BDS sebagai jasa non-finansial yang meningkatkan kinerja perusahaan individual. Dokumen ini memberikan interpretasi definisi ini dan menjabarkan pentingnya BDS. Dalam suatu lingkungan yang semakin kompetitif, baik perusahaan besar maupun UKM

perlu berfokus pada bidang yang benar-benar dikuasai masing-masing pihak daripada mencoba melakukan semuanya dalam perusahaannya sendiri. Implikasi hal ini ialah bahwa perusahaan-perusahaan memerlukan pasar yang efisien yang menyediakan suatu rentang jasa-jasa berkualitas tinggi dengan biaya yang wajar.

Secara khusus, *Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development* mendefinisikan BDS sebagai jasa non-finansial yang meningkatkan kinerja perusahaan, aksesnya ke pasar, dan kemampuannya untuk bersaing, yang mencakup beranekaragam jasa usaha yang dirancang untuk melayani kebutuhan perusahaan secara individual, bukan untuk melayani komunitas bisnis lebih luas.

Dalam suatu studi OECD tahun 1995 "*Boosting Businesses Advisory Services*", BDS dirumuskan sebagai jasa non-finansial yang meningkatkan berfungsinya UKM dalam beranekaragam aktivitas dan meningkatkan kinerjanya, melalui pemberian saran dan keahlian khusus eksternal dalam jangka waktu singkat atau sementara sebagai pelengkap sumberdaya internal perusahaan bersangkutan.

Suatu definisi generik dapat mencakup elemen utama kedua definisi tersebut, sehingga menjadi: BDS adalah jasa non-finansial yang meningkatkan kinerja, akses ke pasar dan kemampuan bersaing suatu perusahaan individual, yang tersedia untuk jangka waktu singkat atau sementara. Definisi ini memang sangat luas dan memerlukan interpretasi namun demikian, karena luas, definisi ini mencakup pengertian bahwa bisnis amat membutuhkan berbagai hal yang beranekaragam dan berubah-ubah agar bisa bertahan hidup dan berkembang.

Menurut Rosyadi (2005:60) Layanan pengembangan bisnis adalah layanan yang diberikan BDS kepada UKM yang meliputi kegiatan antara lain: Layanan informasi, layanan konsultasi, layanan pelatihan, melakukan bimbingan/pendampingan, menyelenggarakan kontak bisnis, fasilitasi dalam memperluas pasar, fasilitasi dalam memperoleh permodalan, fasilitasi dalam pengembangan organisasi dan manajemen, fasilitasi pengembangan teknologi, dan penyusunan proposal pengembangan bisnis

Kegiatan-kegiatan layanan yang diberikan oleh BDS kepada UKM dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi menjadi tiga, yaitu:

- Fungsi perencanaan, meliputi: layanan informasi, layanan konsultasi, bimbingan/pendampingan, dan penyusunan proposal pengembangan bisnis.
- Fungsi pelaksanaan, meliputi: layanan pelatihan, fasilitasi dalam pengembangan organisasi dan manajemen, serta fasilitasi dalam memperoleh permodalan.
- Fungsi pengembangan, meliputi: penyelenggaraan kontak bisnis, fasilitasi dalam memperluas pasar, dan fasilitasi dalam pengembangan teknologi.

Simamora (1995:327) menyatakan bahwa kinerja karyawan (*employee performance*) adalah tingkat terhadap mana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Sementara Nawawi (1997: 235) mengatakan prestasi kerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan baik yang bersifat fisik (*material*) maupun non fisik (*non material*).

Menurut Munandar (2001:288) Untuk mengukur kinerja seorang tenaga kerja digunakan tiga macam ukuran, yaitu: (a) Hasil atau produk kerja, (b) Perilaku pekerjaan, (c) ciri-ciri kepribadian, dan (d) gabungan dari ketiga kategori.

Sedangkan menurut Neal (2004:23) ada dua analisis yang dapat dijadikan alat ukur untuk menilai kinerja, yaitu: *Pertama*, analisis kuantitatif, yaitu analisis yang spesifik, dapat diukur dan dapat dibandingkan pada hal-hal obyektif seperti jumlah dan persentase. Idealnya, dua orang evaluator menggunakan data kuantitatif yang sama sehingga akan tiba pada konklusi yang identik. *Kedua*, analisis kualitatif, yaitu meliputi sifat-sifat personalitas yang tidak dinyatakan dengan jelas dan kebanyakan lebih bersifat subyektif. Dua orang evaluator yang menggunakan analisis kualitatif akan mendapatkan hasil penilaian yang jauh berbeda ketika mengevaluasi orang yang sama.

Ruky (2003:322) menyampaikan pendapat yang relatif sama dengan Neal, dimana pengukuran kuantitatif memfokuskan pengukuran pada biaya-biaya, kapasitas, dan waktu. Pengukuran kualitatif memfokuskan perhatian pada "nilai" (sistem nilai) dan reaksi emosi manusia. Pengukuran kuantitatif menjelaskan "apa yang terjadi", sedangkan pengukuran kualitatif menjelaskan "mengapa itu terjadi". Keduanya membantu meneliti "hasil-hasil" yang dicapai dalam faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan hasil-hasil itu dicapai.

METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh jasa layanan *program Business Development Service (BDS)* yang bersifat non finansial yang dikelompokkan menjadi faktor perencanaan, faktor pelaksanaan dan faktor pengembangan terhadap kinerja pengelola Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang mendapatkan pelayanan *program Business Development Service (BDS)* pada tahun 2007 yang berjumlah 445 UKM (disperindagkop Aceh Utara, 2007) yang tersebar di Jumlah UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Penentuan jumlah sampel digunakan pendekatan slovin (Umar, 2003 : 146) dengan formula sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Di mana:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = % Kelonggaran, ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel

Dalam penelitian ini diketahui N sebesar 445 UKM, e ditetapkan sebesar 10%, jadi jumlah minimal sampel yang diambil oleh peneliti sebesar 82 Orang.

Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur *Random Sampling* dengan metode *Simple Random Sampling*. Selanjutnya sampel ditentukan dengan melakukan persentase jumlah total populasi, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Proporsional Random sampling, sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.

Metode dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan adalah:

Tabel 1. Distribusi Sampel

No	Kabupaten/Kota	Populasi	Persentase	Sampel
1.	Kabupaten Aceh Utara	300	55	45
2.	Kota Lhokseumawe	245	45	37
Jumlah		545	100	82

(Sumber: Data diolah, 2010)

- *Library Research*, yaitu dengan membaca buku-buku, majalah, artikel, informasi dari internet atau sumber bacaan lain yang relevan dengan penelitian ini.
- *Field Research*, yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung pada lokasi dan objek penelitian. Proses ini dilakukan dengan cara:
 - *Observasi*, yaitu dengan mengamati secara langsung objek penelitian
 - *Interview*, yaitu melakukan wawancara dengan Responden dan Pemberi Jasa.
 - *Kuisisioner*, yaitu memberi pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada responden berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Instrumen Penelitian

Instrumen pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Kuesioner (*Questionnaire*), alasan penggunaan kuesioner sebagai pengumpul data pokok adalah:

- Untuk memperoleh informasi yang relevan untuk penelitian ini
- Untuk memperoleh informasi atau data yang valid dan reliabel.

Format kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pertanyaan-pertanyaan tertutup, yakni kemungkinan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban yang lain.

- Pertanyaan-pertanyaan semi tertutup yakni kemungkinan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu namun responden tetap diberi kesempatan memberikan jawaban yang lain.

Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini menggunakan data yang berbentuk ordinal, dimana data ordinal merupakan hasil dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner.

- Aspek pengukuran terhadap data-data yang dianalisis dilakukan dengan pembentukan indikator pada setiap pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan skala likert (*likert scale*) di mana setiap pertanyaan mempunyai interval jawaban antara 1 (Sangat Tidak Setuju) dan 5 (Sangat Setuju). Secara spesifik teknik pengukuran dapat dilihat pada Tabel 2.
- Untuk memperoleh nilai total masing-masing variabel maka skor item pertanyaan dijumlahkan dan selanjutnya dirata-ratakan.
- Skala Guttman untuk tipe pertanyaan yang membutuhkan jawaban tegas, dengan range skor 0 untuk jawaban tidak setuju dan skor 1 untuk jawaban setuju.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik statistika inferensial. Teknik ini digunakan untuk mengukur hubungan dan pengaruh

Tabel 2. Aspek Pengukuran Indikator Penelitian

Variabel	Bobot nilai satu indikator				
	SS	S	N	TS	STS
Kinerja Pengelola (Y)	5	4	3	2	1
Faktor Perencanaan (X_1)	5	4	3	2	1
Faktor Pelaksanaan (X_2)	5	4	3	2	1
Faktor Pengembangan (X_3)	5	4	3	2	1

Keterangan: Masing-masing variabel observasi terdiri dari 5 indikator

variabel bebas terhadap variabel terikat. Peralatan statistik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linier berganda (*multiple regression analysis*), dengan formula sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Di mana:

- Y = Kinerja
- X_1 = Faktor Perencanaan
- X_2 = Faktor Pelaksanaan
- X_3 = Faktor Pengembangan
- a = Konstanta (intersep)
- $b_{1,2,3}$ = Koefisien arah regresi (slope)
- e = Error term

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisa dan dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian. Analisa dan uji hipotesis dilakukan dengan bantuan program SPSS (*Statistic Package for Social Science*).

Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Kinerja Pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe (Y) dalam penelitian ini adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (non material) dengan indikator pencapaian hasil kerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan terkait dengan: permodalan, unit usaha, aspek produksi, pemasaran, omset dan laba usaha.
- Faktor Perencanaan (X_1), yaitu rangkaian jasa layanan terkait dengan aspek perencanaan yang diberikan dalam upaya meningkatkan kinerja. Indikator yang digunakan adalah: layanan informasi, layanan konsultasi, bimbingan/pendampingan dan penyusunan proposal pengembangan bisnis.
- Faktor Pelaksanaan (X_2), yaitu rangkaian jasa layanan terkait dengan aspek pelaksanaan yang diberikan dalam upaya meningkatkan kinerja. Indikator yang digunakan adalah: layanan pelatihan, fasilitasi dalam pengembangan organisasi dan manajemen, serta fasilitasi dalam memperoleh permodalan.
- Faktor Pengembangan (X_3), yaitu rangkaian jasa layanan terkait dengan aspek pengembangan

bisnis yang diberikan dalam upaya meningkatkan kinerja. Indikator yang digunakan adalah: penyelenggaraan kontak bisnis, fasilitasi dalam memperluas pasar dan fasilitasi dalam pengembangan teknologi.

Pengujian Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisa regresi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menentukan besarnya koefisien korelasi dari persamaan regresi yang telah dikemukakan
- Mencari besarnya nilai determinasi atau R^2 yang merupakan koefisien yang menunjukkan besarnya persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
- Untuk menguji ada tidaknya pengaruh tersebut baik secara individu (uji parsial) maupun secara bersama (uji simultan) dilakukan dengan melakukan serangkaian pengujian, yaitu uji t atau " t_{test} " dan uji F atau " F_{test} ".

HASIL

Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 82 orang responden dapat dijelaskan bahwa gambaran demografi meliputi; jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan status dapat mempengaruhi proses produksi kilang padi. Untuk lebih jelasnya mengenai karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 3.

Secara umum karakteristik responden penelitian ini didominasi oleh pengelola yang berusia antara 31–40 tahun (59,76%), berjenis kelamin laki-laki (84,15%) dengan tingkat pendidikan terakhir SLTA/SMK (50%), sudah menikah (82,93%) serta memperoleh laba usaha rata-rata perbulan antara Rp1.500.001–Rp2.000.000,-

PEMBAHASAN

Analisis Statistik

Berdasarkan hasil estimasi terhadap variabel yang diteliti melalui hasil perhitungan regresi berganda secara keseluruhan menggunakan program SPSS 12.0 diperoleh parameter untuk masing-masing variabel dapat dilihat sebagaimana Tabel 4.

Tabel 3. Karakteristik Responden Pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe

No	Variabel	Frekuensi	Persentase
1	Usia		
	a. Dibawah 20 Tahun	-	0,0
	b. 21- 30 Tahun	12	14,63
	c. 31- 40 Tahun	49	59,76
	d. 41- 50 Tahun	19	23,17
	e. Diatas 51 Tahun	2	2,44
2	Jenis Kelamin		
	a. Laki-laki	69	84,15
	b. Perempuan	13	15,85
3	Tingkat Pendidikan		
	a. Lulus SD	6	7,32
	b. Lulus SLTP/MTS	20	24,38
	c. Lulus SLTA/SMK	41	50,0
	d. D1/D2/D3	7	8,54
	e. Sarjana/S1	8	9,76
	f. Pascasarjana S2/S3	-	0,0
4	Status		
	a. Belum menikah	-	0,0
	b. Menikah	68	82,93
	c. Janda/Duda	14	17,07
5	Laba rata-rata per bulan		
	a. Kurang dari Rp.500.000,-	3	3,66
	b. Rp.500.001,- -Rp.1.000.000,-	7	8,54
	c. Rp.1.000.001,- -Rp.1.500.000,-	9	10,97
	d. Rp.1.500.001,- -Rp.2.000.000,-	38	46,34
	e. Di atas Rp 2.000.000,-	25	30,49

(Sumber: Data diolah, 2010)

Tabel 4. Model Summary

Nama Variabel	B	Standar Error	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig
Konstanta	3,206	0,419	7,652	1,990	0,000
Faktor Perencanaan (X ₁)	0,347	0,074	4,679	1,990	0,000
Faktor Pelaksanaan (X ₂)	0,173	0,123	1,411	1,990	0,162
Faktor Pengembangan (X ₃)	0,038	0,122	0,309	1,990	0,758
Koefisien Korelasi (R)	= 0,557 ^a	a. Predictors : (Constant)			
Koefisien Determinasi (R ²)	= 0,310	Faktor Perencanaan (X ₁), Faktor			
F _{hitung}	=	Pelaksanaan (X ₂) dan Faktor			
F _{tabel}	11,673	Pengembangan (X ₃)			
F Sig	= 2,72	b. Dependent Variabel :			
	= 0,000 ^a	Kinerja Pengelola UKM (Y).			

(Sumber: Data diolah, 2010)

Berdasarkan hasil estimasi terhadap variabel yang diteliti melalui hasil perhitungan regresi berganda secara keseluruhan diperoleh parameter untuk masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut:

$$Y = 3,206 + 0,347X_1 + 0,173X_2 + 0,038X_3$$

Konstanta sebesar 3,206 ini menyatakan bahwa jika tidak ada pelayanan program *Business Development Service (BDS)* berupa Faktor Perencanaan (X_1), Faktor Pelaksanaan (X_2) dan Faktor Pengembangan (X_3), maka Kinerja Pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe adalah sebesar 3,206.

Koefisien regresi Faktor Perencanaan (X_1) sebesar 0,347 menyatakan bahwa setiap penambahan sebesar 1% variabel Faktor Perencanaan (X_1), maka akan terjadi peningkatan Kinerja Pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe sebesar 0,347 atau 34,7% pada tingkat signifikansi 0,000.

Sementara koefisien regresi Faktor Pelaksanaan (X_2) sebesar 0,173 berarti bahwa setiap penambahan 1% variabel Faktor Pelaksanaan akan meningkatkan Kinerja Pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe sebesar 0,173 atau 17,3% pada tingkat signifikansi 0,162.

Koefisien regresi Faktor Pengembangan (X_3) sebesar 0,038, berarti bahwa setiap penambahan 1% variabel Faktor Pengembangan akan meningkatkan Kinerja Pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe sebesar 0,038 atau 3,8% pada tingkat signifikansi 0,758. Dengan demikian, menyatakan bahwa antara variabel X dan Y adanya hubungan searah, di mana kenaikan atau penurunan variabel independen (X) akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel dependen (Y).

Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4 menjelaskan hasil penelitian di mana koefisien korelasi (R) sebesar 0,557 yang menunjukkan derajat hubungan (korelasi) antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 55,7%. Artinya program *Business Development Service (BDS)* mempunyai hubungan yang kuat dengan Kinerja Pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Sedangkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,310. Artinya sebesar 0,310 atau 31% perubahan-

perubahan dalam variabel terikat (Kinerja Pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam faktor program *Business Development Service (BDS)*. Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 69% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar dari variabel yang dijadikan indikator program *Business Development Service (BDS)*.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa dari ketiga variabel yang mempengaruhi program *Business Development Service (BDS)* yang diteliti, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 11,673, sedangkan F_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 2,72. Hal ini memperlihatkan, bahwa berdasarkan perhitungan uji statistik F_{hitung} menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan tingkat probabilitas 0,000. Dengan demikian hasil perhitungan ini dapat diambil suatu keputusan bahwa hipotesis alternatif (H_a) yang diajukan dapat diterima dan menolak hipotesis nol, artinya program *Business Development Service (BDS)* secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Untuk menguji faktor program *Business Development Service (BDS)* yang mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe secara parsial (masing-masing variabel) dapat dilihat dari hasil uji-t. Di mana dapat diketahui besarnya nilai t_{hitung} untuk masing-masing variabel dengan tingkat kepercayaan atau signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$.

Variabel Faktor Perencanaan (X_1) mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 4,679 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,990, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau probabilitas jauh dibawah $\alpha = 5\%$ Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel Faktor Perencanaan (X_1) berpengaruh

secara signifikan terhadap Kinerja Pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Variabel Faktor Pelaksanaan (X_2) mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 1,411 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,990, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,162 atau probabilitas di atas $\alpha = 5\%$ (0,05). Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel Faktor Pelaksanaan (X_2) tidak signifikan mempengaruhi Kinerja Pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Variabel Faktor Pengembangan (X_3) mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 0,309 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,990, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,758 atau probabilitas di atas $\alpha = 5\%$ (0,05). Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel Faktor Pengembangan (X_3) tidak signifikan mempengaruhi Kinerja Pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirangkum beberapa kesimpulan penting, antara lain sebagai berikut.

Hasil uji validitas instrumen penelitian variabel perencanaan (X_1), variabel pelaksanaan (X_2), variabel pengembangan (X_3) dan variabel kinerja pengusaha (Y) menunjukkan koefisien korelasi item skor berada di atas 0.50 sehingga memenuhi syarat untuk validitas.

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan semua variabel yang diuji mempunyai *Alpha Cronbach* di atas 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang diuji reliabel secara statistik.

Secara umum karakteristik responden penelitian ini didominasi oleh pengelola yang berusia antara 31–40 tahun (59,76%), berjenis kelamin laki-laki (84,15%) dengan tingkat pendidikan terakhir SLTA/SMK (50%), sudah menikah (82,93%) serta memperoleh laba usaha rata-rata perbulan antara Rp1.500.001 – Rp2.000.000,-

Variabel program *Business Development Service (BDS)* seperti faktor perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan berpengaruh positif terhadap

kinerja pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,310. Artinya sebesar 0,310 atau 31% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (Kinerja Pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam faktor program *Business Development Service (BDS)*. Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 69% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar dari variabel yang dijadikan indikator program *Business Development Service (BDS)*.

Secara simultan keseluruhan variabel program *Business Development Service (BDS)* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelola UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang berarti penelitian ini dapat menerima hipotesis alternatif dan menolak hipotesis H_0 .

Saran

Menyadari kelemahan-kelemahan yang dialami UKM serta mengingat potensi pengusaha kecil yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan di Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya dan Kabupaten Aceh Utara serta Kota Lhokseumawe pada khususnya, diharapkan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) dan instansi terkait untuk dapat melakukan pembinaan terhadap UMKM diantaranya dengan program *Business Development Service (BDS)* secara lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja UKM.

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar pemerintah dapat menganalisis dengan jelas kondisi perekonomian rakyat, potensi ekonomi yang dimiliki dan mengupayakan program rehabilitasi ekonomi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Umpan balik yang diharapkan berupa adanya formulasi kebijakan perekonomian dan rencana strategis yang lebih memihak pada rakyat kecil terutama bagi pengembangan UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe

Diharapkan bagi berbagai pihak yang telah memberikan jasa layanan *Business Development Service (BDS)* untuk dapat melakukan evaluasi dan *monitoring* secara terpadu sehingga peningkatan

kinerja bisnis dan kinerja pengelola bisnis UKM dapat tercapai.

DAFTAR RUJUKAN

- Anoraga, P., dan Sudantoko, D. 2002, *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: Penerbit Rieneka Putra.
- Bappeda, dan BPS. 1999. *Informasi Kuantitatif 40 Tahun Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh.
- . 1999. *Informasi Kuantitatif 40 Tahun Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*; Banda Aceh.
- . 1999/2000. *Ringkasan Eksekutif: Laporan Juni 1999–Februari 2000*; Banda Aceh.
- Bank Indonesia. 1999. *Perkembangan Ekonomi Keuangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Laporan Semester I, Banda Aceh.
- . 1999. *Perkembangan Ekonomi Keuangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Laporan Desember, Banda Aceh.
- BPPN. 2000. *Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2001-2005*; Banda Aceh.
- BPS. 1998. *Aceh Dalam Angka*; Banda Aceh.
- Disperindagkop. 2007. *Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Program Binaan Tahun 2007 dalam Kabupaten Aceh Utara*, Lhokseumawe.
- Ismawan, B. 2002. *Ekonomi Rakyat Sebuah Pengantar*. Makalah Dipresentasikan untuk Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Jakarta, 22 Januari 2002.
- Kotler, P. 1997. *Manajemen Pemasaran, Marketing Management 9e, Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol*, Jilid 1, Alih Bahasa Hendra teguh, SE. Ak dan Ronny A. rusli SE, Ak. Jakarta: Penerbit PT Prenhallindo.
- Kountur, R. 2004, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Mulyo, A.S., Tika, N., dan Rohmani. 2005. *Peran Lembaga Outsourcing Semakin Penting*, SwissContact, Padang.
- Munandar, A.S. 2001. *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Muslimin. 2002. *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Bayu. Malang: Media UMM Press.
- Nawawi, H. 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Penerbit UGM.
- Neal, J.E. 2003, *Panduan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Rosyadi, I. 2005, *Program Business Development Service (BDS) dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Timur*, Thesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ruky, A. 2003, *SDM Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Simamora, H. 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit STIE YPKN.
- Suhendar, S., dan Eriyatno. 2001. *Rekayasa Kemitraan Usaha dan Peran BDS dalam Pengembangan Ekonomi Lokal*, di dalam Bunga Rampai "Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. Penerbit Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota dan BIC-Indonesia, Jakarta.
- Umar, H. 2003, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia.
- Urata, S. 2000. *Policy Recommendation for SME Promotion in The Republic of Indonesia*. JICA.